

DJKN



Laporan

# KEUANGAN

Tahun Anggaran 2022 (Audited)

**KAILI**  
Kami Ikhlas  
Melayani



Jl. Prof. Moh. Yamin No.55,  
Tirtani Utama, Paku Selatan,  
Kota Paku, Central Sulawesi 94111



[ipknipaku@kemendikbud.go.id](mailto:ipknipaku@kemendikbud.go.id)



(0341)  
0811



## KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara jo. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Palu sebagai salah satu entitas akuntansi di bawah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara juga mempunyai kewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan KPKNL Palu Tahun 2022 (*Audited*) mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan dan juga berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat. Laporan keuangan disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan KPKNL Palu Tahun 2022 (*Audited*) ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pemakai laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/ pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Palu. Di samping itu laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Palu, 05 Mei 2023

Kepala Kantor,



Krisdianto

NIP 198105242001121001

## DAFTAR ISI

	<b>Hal</b>
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Pernyataan Tanggung Jawab	iii
Ringkasan	1
I. Laporan Realisasi Anggaran	3
II. Neraca	4
III. Laporan Operasional	5
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	6
V. Catatan atas Laporan Keuangan	7
A. Penjelasan Umum	7
B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran	20
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca	25
D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional	31
E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas	37
VI. Lampiran	



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA**  
**KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PALU**

Jalan Prof. Moh. Yamin Nomor 55 Palu 94117  
TELEPON (0451), SUREL: KPKNLPALU@KEMENKEU.GO.ID

---

## **PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB**

Laporan Keuangan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Palu Tahun Anggaran 2022 (*Audited*) yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

**Palu, 05 Mei 2023**  
**Kepala Kantor,**



**Krisdianto**  
**NIP 198105242001121001**

## RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Palu Tahun Anggaran 2022 (Audited) ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

### 1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2022.

Realisasi Pendapatan Negara TA 2022 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp5.415.141.652 atau mencapai 148% dari estimasi pendapatan sebesar Rp3.667.237.000.

Realisasi Belanja Negara TA 2022 adalah sebesar Rp1.485.302.311 atau mencapai 90% dari alokasi anggaran sebesar Rp1.652.889.000.

### 2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2022.

Nilai Aset per 31 Desember 2022 dicatat dan disajikan sebesar Rp42.967.496.723,6 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp510.195.186,6 dan Aset Tetap (neto) sebesar Rp42.457.301.537 serta Aset Lainnya sebesar Rp0.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp486.765.586,6 dan Rp42.480.731.137.

### 3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp5.415.693.218 sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp2.140.111.086 sehingga terdapat Surplus dari Kegiatan Operasional senilai Rp3.275.582.132, sehingga entitas mengalami Surplus-LO sebesar Rp3.279.343.132.

#### **4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2022 adalah sebesar Rp42.988.098.251 ditambah Surplus-LO sebesar Rp3.279.343.132 dan Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi sebesar Rp16.267.845 dan dikurangi Penurunan Ekuitas sebesar (Rp507.367.114) sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2022 adalah senilai Rp42.480.731.137.

#### **5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2022 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

## I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

### KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PALU LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE 31 DESEMBER 2022

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 2022		% thd Angg	31 DESEMBER 2021
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
<b>PENDAPATAN</b>					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	3.667.237.000	5.415.141.652	148	4.812.559.872
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>		<b>3.667.237.000</b>	<b>5.415.141.652</b>	<b>148</b>	<b>4.812.559.872</b>
<b>BELANJA</b>					
<b>Belanja Negara</b>					
Belanja Pegawai	B.2	0	0	0	0
Belanja Barang	B.3	1.652.889.000	1.485.302.311	90	1.310.270.510
Belanja Modal	B.4	0	0	0	61.798.999
<b>Jumlah Belanja Operasi</b>		<b>1.652.889.000</b>	<b>1.485.302.311</b>	<b>90</b>	<b>1.372.069.509</b>
<b>JUMLAH BELANJA</b>		<b>1.652.889.000</b>	<b>1.485.302.311</b>	<b>90</b>	<b>1.372.069.509</b>

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

## II. NERACA

**KANTOR PELAYANAN NEGARA DAN LELANG PALU**  
**NERACA**  
**PER 31 DESEMBER 2022 DAN 2021**

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 2022	31 DESEMBER 2021
<b>ASET</b>			
<b>ASET LANCAR</b>			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	0	0
Kas di Bendahara Penerimaan	C.2	4.826.733	514.167
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.3	484.208.767,6	6.100.000
Pendapatan Yang Masih Harus Diterima	C.4	0	0
Persediaan	C.5	21.159.686	22.940.930
<b>Jumlah Aset Lancar</b>		<b>510.195.186,6</b>	<b>29.555.097</b>
<b>ASET TETAP</b>			
Tanah	C.6	32.864.083.988	32.864.083.988
Peralatan dan Mesin	C.7	4.058.171.191	4.067.822.447
Gedung dan Bangunan	C.8	9.548.591.730	9.433.649.730
Jalan, Irigasi dan Jaringan	C.9	209.936.000	324.878.000
Aset Tetap Lainnya	C.10	4.940.000	4.940.000
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.11	(4.228.421.372)	(3.728.294.891)
<b>Jumlah Aset Tetap</b>		<b>42.457.301.537</b>	<b>42.967.079.274</b>
<b>ASET LAINNYA</b>			
Aset Lain-lain	C.12	0	0
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	C.13	0	0
<b>Jumlah Aset Lainnya</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>JUMLAH ASET</b>		<b>42.967.496.723,6</b>	<b>42.996.634.371</b>
<b>KEWAJIBAN</b>			
<b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>			
Utang kepada Pihak Ketiga	C.14	486.765.586,6	8.536.120
Utang Yang Belum Ditagihkan	C.15	0	0
Uang Muka dari KPPN	C.16	0	0
<b>Jumlah Kewajiban Jangka Pendek</b>		<b>486.765.586,6</b>	<b>8.536.120</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>		<b>486.765.586,6</b>	<b>8.536.120</b>
<b>EKUITAS</b>			
Ekuitas	C.17	42.480.731.137	42.988.098.251
<b>JUMLAH EKUITAS</b>		<b>42.480.731.137</b>	<b>42.988.098.251</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>		<b>42.967.496.723,6</b>	<b>42.996.634.371</b>

*Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan*

### III. LAPORAN OPERASIONAL

## KANTOR KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PALU LAPORAN OPERASIONAL UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 2022	31 DESEMBER 2021
<b>KEGIATAN OPERASIONAL</b>			
<b>PENDAPATAN</b>			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1	5.415.693.218	4.778.320.702
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>		<b>5.415.693.218</b>	<b>4.778.320.702</b>
<b>BEBAN</b>			
Beban Pegawai	D.2	0	0
Beban Persediaan	D.3	50.325.744	93.658.839
Beban Barang dan Jasa	D.4	793.865.870	775.026.880
Beban Pemeliharaan	D.5	337.124.829	307.330.328
Beban Perjalanan Dinas	D.6	305.887.811	152.266.422
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.7	652.906.832	683.656.994
<b>JUMLAH BEBAN</b>		<b>2.140.111.086</b>	<b>2.011.939.463</b>
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		<b>3.275.582.132</b>	<b>2.766.381.239</b>
<b>KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>			
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar		3.761.000	17.146.436
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		0	0
SURPLUS /DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	D.8	3.761.000	17.146.436
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		<b>3.279.343.132</b>	<b>2.783.527.675</b>
<b>SURPLUS/DEFISIT LO</b>		<b>3.279.343.132</b>	<b>2.783.527.675</b>

*Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan*

**IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**

**KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PALU  
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022**

*(Dalam Rupiah)*

URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 2022	31 DESEMBER 2021
<b>EKUITAS AWAL</b>	E.1	42.988.098.251	48.718.036.951
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	3.279.343.132	2.783.527.675
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR	E.3	0	0
KOREKSI YANG MENAMBAH /MENGURANGI EKUITAS	E.4	16.267.845	0
PENYESUAIAN NILAI ASET		0	0
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN		0	0
SELISIH REVALUASI ASET TETAP		0	0
KOREKSI NILAI ASET TETAP NON REVALUASI		16.267.845	0
KOREKSI LAIN-LAIN		0	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.5	(3.802.978.091)	(8.513.466.375)
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS		(507.367.114)	(5.729.938.700)
<b>EKUITAS AKHIR</b>	<b>E.6</b>	<b>42.480.731.137</b>	<b>42.988.098.251</b>

*Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan*

## V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

### A. PENJELASAN UMUM

*Dasar Hukum  
Entitas dan  
Rencana  
Strategis*

#### A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Palu

Reformasi Birokrasi di lingkungan Departemen Keuangan pada tahun 2006 menjadikan fungsi pengurusan piutang negara dan pelayanan lelang digabungkan dengan fungsi pengelolaan kekayaan negara pada Direktorat Pengelolaan Barang Milik/Kekayaan Negara (PBM/KN) Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb), sehingga berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2006 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Republik Indonesia, DJPLN berubah menjadi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN). Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Palu merupakan kantor vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang berada di Provinsi Sulawesi Tengah.

Dalam melaksanakan tugas yang dibebankan kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Palu, telah sepakat untuk menjalankan visi DJKN untuk tahun 2020-2024 yaitu “Menjadi Pengelola Kekayaan Negara yang Profesional dan Akuntabel dalam rangka mendukung visi Kementerian Keuangan: Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan, serta untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.”.

Pada visi tersebut, terminologi Pengelola Kekayaan Negara merupakan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara sebagai lembaga atau institusi yang mempunyai tugas untuk merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang kekayaan negara secara profesional dan akuntabel. Profesional adalah pengelolaan kekayaan negara dilaksanakan sesuai prosedur, norma waktu, standar profesi, dan standar keilmuan yang telah diterapkan. Akuntabel adalah pengelolaan kekayaan negara dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat adalah pengelolaan kekayaan negara dilaksanakan untuk kepentingan negara dalam mewujudkan kemakmuran rakyat. Visi DJKN tersebut juga dalam rangka

mendukung visi Kementerian Keuangan dimana DJKN merupakan bagian dari Kementerian Keuangan itu sendiri.

Untuk merealisasikan visi yang telah ditetapkan, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara mendukung Misi Kementerian Keuangan nomor 4 (mengelola neraca keuangan pusat yang inovatif dengan risiko minimum) dan nomor 2 (mencapai tingkat pendapatan negara yang tinggi melalui pelayanan prima serta pengawasan dan penegakan hukum yang efektif) melalui Misi sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan pengelolaan kekayaan negara;
2. Mengamankan kekayaan negara secara fisik, administrasi, dan hukum;
3. Meningkatkan tata kelola dan nilai tambah pengelolaan kekayaan negara;
4. Menghasilkan nilai kekayaan negara yang wajar dan dapat dijadikan acuan dalam berbagai keperluan;
5. Mewujudkan lelang yang efisien, transparan, akuntabel, adil, dan kompetitif sebagai instrumen jual beli yang mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat.

Selain arah kebijakan nasional dan Kementerian Keuangan, untuk mendorong tercapainya Visi, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara juga mempunyai Arah Kebijakan dan Strategi yang akan dilaksanakan dalam periode waktu 2020-2024. Adapun Arah Kebijakan dan Strategi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pengelolaan kekayaan negara yang lebih efisien dan efektif serta memberi manfaat finansial dan sosial Kondisi yang ingin dicapai dalam Arah Kebijakan ini adalah:
  - a. Pengelolaan kekayaan negara yang lebih efisien, efektif dan optimal;
  - b. Pengelolaan investasi pemerintah yang memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan lainnya.

Adapun Strategi yang dilakukan untuk mewujudkan kondisi pengelolaan kekayaan negara yang lebih efisien, efektif dan optimal adalah:

- a. Rekonsiliasi dan pemutakhiran data piutang negara seluruh Kementerian/Lembaga;
- b. Optimalisasi pengelolaan piutang negara;
- c. Penguatan regulasi di bidang kekayaan negara melalui penyusunan RUU Pengelolaan Kekayaan Negara (Omnibus Law);

- d. Penyederhanaan regulasi di bidang Pengelolaan BMN dengan tetap menjaga akuntabilitas;

Implementasi Strategi di atas akan dilaksanakan oleh Direktorat Barang Milik Negara, Direktorat Piutang Negara dan Kekayaan Negara Lain-Lain, Direktorat Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi, dan Direktorat Hukum dan Hubungan Masyarakat.

Adapun Strategi yang dilakukan untuk mewujudkan kondisi pengelolaan investasi pemerintah yang memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan lainnya adalah:

- a. Peningkatan kapasitas SDM, perbaikan bisnis proses dan perangkat analisis Investasi Pemerintah;
- b. Cross function unit vertikal DJKN/Kementerian Keuangan (DJP/DJBC/DJPB) dan SMV Kementerian Keuangan dalam pelaksanaan program kerja SMV.

Implementasi Strategi di atas akan dilaksanakan oleh Direktorat Kekayaan Negara Dipisahkan.

## 2. Pelayanan lelang yang modern dan terpercaya

Kondisi yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan Arah Kebijakan ini adalah pengelolaan lelang yang optimal. Adapun strategi yang dilakukan untuk mencapai pengelolaan lelang yang optimal adalah:

- a. Pelaksanaan e-Auction yang mengakomodasi prinsip-prinsip ecommerce baik secara mandiri atau bekerja sama dengan perusahaan startup di bidang marketplace.
- b. Pengembangan kualitas sumber daya manusia di bidang lelang dengan kemampuan teknologi informasi yang andal dan modern.

Implementasi Strategi di atas akan dilaksanakan oleh Direktorat Lelang.

## 3. Pelayanan penilaian yang akuntabel dan efisien

Kondisi yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan Arah Kebijakan ini adalah penilaian yang berkualitas. Adapun strategi yang dilakukan untuk mencapai kondisi tersebut adalah:

- a. Pengembangan sistem informasi penilaian yang terintegrasi dengan instansi terkait secara nasional yang dapat digunakan dalam pengelolaan kekayaan negara.
- b. Peningkatan kompetensi Pejabat Fungsional Penilai Pemerintah.

Implementasi Strategi di atas akan dilaksanakan oleh Direktorat Penilaian

4. Birokrasi dan layanan publik DJKN yang agile, efektif, dan efisien  
Kondisi yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan Arah Kebijakan ini adalah:
  - a. Organisasi dan SDM yang optimal;
  - b. Sistem informasi yang andal dan terintegrasi;
  - c. Pengendalian dan pengawasan internal yang bernilai tambah; dan
  - d. Komunikasi publik yang efektif.

Strategi yang dilakukan untuk mencapai organisasi dan SDM yang optimal adalah:

- a. Restrukturisasi dan penajaman tugas dan fungsi unit kerja DJKN;
- b. Penguatan penyedia tenaga fungsional dan profesional bersertifikasi;
- c. Pembentukan unit pengelola BMN Hulu Migas;

Implementasi Strategi di atas akan dilaksanakan oleh Sekretariat Direktorat Jenderal dan Direktorat Piutang Negara dan Kekayaan Negara Lain-Lain.

Strategi yang dilakukan untuk mencapai sistem informasi yang andal dan terintegrasi adalah:

- a. Transformasi digital manajemen aset dengan mewujudkan IT-Based Service Kekayaan Negara;
- b. Pengembangan pusat data yang integratif dan andal untuk berbagai kepentingan;
- c. Peningkatan kapabilitas tata kelola TIK DJKN.

Implementasi Strategi di atas akan dilaksanakan oleh Direktorat Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi.

Strategi yang dilakukan untuk mencapai pengendalian dan pengawasan internal yang bernilai tambah adalah penguatan unit kepatuhan internal di

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Implementasi Strategi tersebut akan dilaksanakan oleh Sekretariat Direktorat Jenderal.

Strategi yang dilakukan untuk mencapai komunikasi publik yang efektif adalah peningkatan kapabilitas dan tata kelola Kehumasan DJKN. Implementasi Strategi tersebut akan dilaksanakan oleh Direktorat Hukum dan Hubungan Masyarakat.

*Pendekatan  
Penyusunan  
Laporan  
Keuangan*

## **A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan**

Laporan Keuangan Tahun 2022 (*Audited*) ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Palu. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya. Sejak tahun 2018 penyusunan Laporan Keuangan di Lingkup Direktorat Jenderal Kekayaan Negara sudah didasarkan pada Aplikasi SAKTI yang telah melingkupi SAIBA dan SIMAK-BMN. Data dari SAKTI tersebut sudah terinterkoneksi dengan web e-rekon-ik yang digunakan sebagai dasar angka-angka dalam Laporan Keuangan ini.

*Basis Akuntansi*

## **A.3. Basis Akuntansi**

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Palu menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui

pengaruhi transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

**Dasar  
Pengukuran**

#### **A.4. Dasar Pengukuran**

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Palu dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

**Kebijakan  
Akuntansi**

#### **A.5. Kebijakan Akuntansi**

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2022 (*Audited*) telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan yang merupakan entitas pelaporan dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Palu. Di samping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Palu adalah sebagai berikut:

*Pendapatan-  
LRA*

**(1) Pendapatan- LRA**

- Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

*Pendapatan-LO*

**(2) Pendapatan- LO**

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

*Belanja*

**(3) Belanja**

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan

selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

*Beban*

**(4) Beban**

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

*Aset*

**(5) Aset**

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

*Aset Lancar*

**Aset Lancar**

- Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihan atau yang dipersamakan, yang diharapkan diterima pengembaliannya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik pada

tanggal neraca dikalikan dengan:

- harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
- harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
- harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

#### *Aset Tetap*

#### **Aset Tetap**

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
  - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
  - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
  - c. Pengeluaran untuk ATR berupa peralatan dan mesin yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah)
  - d. Pengeluaran untuk ATR berupa gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah).

#### *Piutang Jangka Panjang*

#### **Piutang Jangka Panjang**

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Termasuk dalam Piutang Jangka Panjang adalah Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun.
- TPA menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan

aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah yang dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar oleh pegawai ke kas negara atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.

- Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian Negara/daerah.
- Tuntutan Ganti Rugi adalah suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri atau bukan pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya.

#### *Aset Lainnya*

#### **Aset Lainnya**

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud, dan Aset Lain-lain.
- Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.
- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional entitas.

#### *Kewajiban*

#### **(6) Kewajiban**

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

*Ekuitas*

**(7) Ekuitas**

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

*Penyisihan  
Piutang Tak  
Tertagih*

**(8) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih**

- Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah.
- Kualitas piutang didasarkan pada kondisi masing-masing piutang pada tanggal pelaporan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 69/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara.

Kriteria kualitas piutang diatur sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan 2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	100%

*Penyusutan  
Aset Tetap*

**(9) Penyusutan Aset Tetap**

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No.01/PMK.06/2013 sebagaimana diubah dengan PMK No. 90/PMK.06/2014 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
  - a. Tanah
  - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
  - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa

Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

*Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap*

<b>Kelompok Aset Tetap</b>	<b>Masa Manfaat</b>
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d. 40 tahun
Alat Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

*Implementasi  
Akuntansi  
Pemerintah  
Berbasis Akrual  
Pertama kali*

**(10) Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual Pertama Kali**

Mulai tahun 2015 Pemerintah mengimplementasikan akuntansi berbasis akrual sesuai dengan amanat PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Implementasi tersebut memberikan pengaruh pada beberapa hal dalam penyajian laporan keuangan. Pertama, Pos-pos ekuitas dana pada neraca per 31 Desember 2014 yang berbasis *cash toward accrual* direklasifikasi menjadi ekuitas sesuai dengan akuntansi berbasis akrual. Kedua, keterbandingan penyajian akun-akun tahun berjalan dengan tahun sebelumnya dalam Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas tidak dapat dipenuhi. Hal ini diakibatkan oleh penyusunan dan penyajian akuntansi berbasis akrual pertama kali mulai dilaksanakan tahun 2015.

## B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Palu dikenakan pengurangan dana melalui mekanisme revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal sebanyak 3 (tiga) kali. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja antara lain:

URAIAN	2022		
	ANGGARAN	ANGGARAN	+/-
	AWAL	SETELAH REVISI	
<b>Pendapatan</b>			
Pendapatan Negara Bukan Pajak	3.667.237.000	3.667.237.000	-
<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>3.667.237.000</b>	<b>3.667.237.000</b>	<b>-</b>
<b>Belanja</b>			
Belanja Barang	1.603.971.000	1.652.889.000	48.918.000
Belanja Modal	0	0	-
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>1.603.971.000</b>	<b>1.652.889.000</b>	<b>48.918.000</b>

Revisi tersebut antara lain berupa pengurangan pagu terdiri dari Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos (521114) sebesar Rp3.600.000, Belanja Barang Operasional (521131) sebesar Rp3.960.000, Belanja Bahan (521211) sebesar Rp5.722.000, Belanja Barang Persediaan Konsumsi (521811) sebesar Rp7.922.000, Belanja Langganan Listrik (522111) sebesar Rp4.200.000, Belanja Jasa-Penanganan Pandemi (522192) sebesar Rp7.425.000, Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin (52312) sebesar Rp19.113.000.

Sedangkan Revisi Penambahan Pagu terdiri Belanja Keperluan Perkantoran (521111) sebesar Rp10.866.000, Belanja Barang Operasional Lainnya (521119) sebesar Rp8.500.000, Belanja Barang Non Operasional Lainnya (521219) sebesar Rp6.448.000, Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan (523111) sebesar Rp26.854.000, Belanja Perjalanan Biasa (524111) sebesar Rp44.712.000, Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (524113) sebesar Rp3.480.000.

Realisasi  
Pendapatan  
Negara Bukan  
Pajak  
Rp5.415.141.652

### Pendapatan

#### B.1 Pendapatan Negara Bukan Pajak

Realisasi Pendapatan untuk Tahun Anggaran 2022 yang berakhir pada 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp5.415.141.652. Keseluruhan Pendapatan Negara berasal dari Pendapatan Negara Bukan Pajak.

Rincian estimasi pendapatan dan realisasinya adalah sebagai berikut:

*Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan*

URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI	%
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	3.761.000	100%
Pendapatan Jasa Lainnya	0	100	100%
Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	0	6.996.171	100%
Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas I	2.029.000.000	2.511.993.542	124%
Pendapatan Bea Lelang Pegadaian	1.638.000.000	2.870.155.240	175%
Pendapatan Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara	237.000	21.594.593	9112%
Pendapatan Penyetoran Kelebihan Hasil Bersih Lelang yang Tidak Diambil Oleh Yang Berhak	0	592.874	100%
Pendapatan Anggaran Lain-Lain	0	48.132	100%
<b>Jumlah</b>	<b>3.667.237.000</b>	<b>5.415.141.652</b>	<b>148%</b>

Realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2022 mengalami kenaikan sebesar 13% sebesar Rp602.581.780 dibandingkan dengan TA 2021. Hal ini disebabkan kenaikan Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro), Pendapatan Bea Lelang Pejabat Kelas I, Pendapatan Penyetoran Kelebihan Hasil Bersih Lelang yang tidak diambil.

Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro) muncul akibat rekening pada KPKNL Palu masih menggunakan metode *non Treasury National Pooling* (TNP) sehingga setiap bulannya bendahara penerimaan menerima Jasa Giro dan dipotong Pajak Penghasilan atas jasa giro tersebut. Bendahara penerimaan secara rutin menyetorkan Jasa Giro dan PPh tersebut kepada kas negara dan KPKNL Palu sedang dalam tahap pengajuan untuk merubah menjadi *Treasury National Pooling* (TNP).

*Perbandingan Realisasi Pendapatan per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021*

URAIAN	31 DESEMBER 2022	31 DESEMBER 2021	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
Pendapatan	5.415.141.652	4.812.559.872	602.581.780	13%
<b>JUMLAH</b>	<b>5.415.141.652</b>	<b>4.812.559.872</b>	<b>602.581.780</b>	<b>13%</b>

*Realisasi Belanja* **Belanja**

*Rp1.485.302.311*

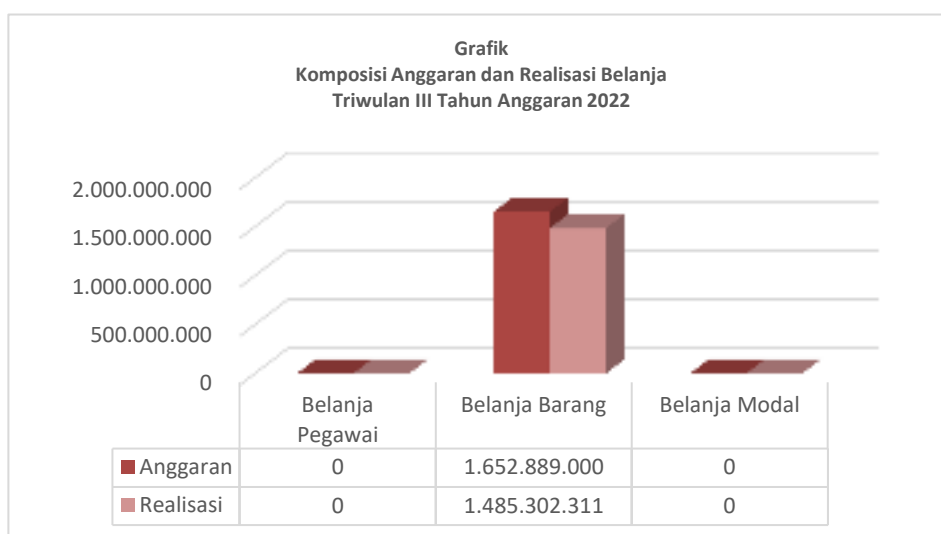
Realisasi Belanja Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Palu pada 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp1.485.302.311 atau sebesar 90% dari

anggaran belanja setelah Revisi sebesar Rp1.652.889.000. Rincian anggaran dan realisasi belanja 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

*Rincian Estimasi dan Realisasi Belanja per 31 Desember 2022*

KODE JENIS BELANJA	URAIAN	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI	%
51	Belanja Pegawai	0	0	0%
52	Belanja Barang	1.652.889.000	1.485.302.311	90%
53	Belanja Modal	0	0	0,0%
<b>Jumlah</b>		<b>1.652.889.000</b>	<b>1.485.302.311</b>	<b>90%</b>

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini:



Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp113.232.802 atau sebesar 8,3% dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya.

Perbandingan realisasi belanja 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 dapat dilihat pada Tabel berikut ini:

*Perbandingan Realisasi Belanja 2022 dan 2021*

KODE JENIS BELANJA	URAIAN	REALISASI		NAIK/(TURUN)	
		31 DESEMBER 2022	31 DESEMBER 2021	Rp	%
51	Belanja Pegawai	0	0	0	0,0%
52	Belanja Barang	1.485.302.311	1.310.270.510	175.031.801	13,4%
53	Belanja Modal	0	61.798.999	-61.798.999	0,0%
<b>Jumlah</b>		<b>1.485.302.311</b>	<b>1.372.069.509</b>	<b>113.232.802</b>	<b>8,3%</b>

**Belanja Pegawai** **B.2 Belanja Pegawai**

Rp0

Realisasi Belanja Pegawai 31 Desember 2022 dan 2021 sebesar Rp0. Sehubungan dengan ditetapkan Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 2/KN/2020 tentang Sentralisasi Pengelolaan Belanja Pegawai untuk Pegawai Lingkup Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, telah dilaksanakan Uji Coba (*Piloting*) Sentralisasi Pengelolaan Belanja Pegawai di Direktorat Jenderal Kekayaan Negara meliputi pembayaran atas Gaji (beserta tunjangan yang melekat), Gaji ke-13, Tunjangan Hari Raya, Uang Muka/Persekot Gaji, Uang Makan dan Uang Lembur.

Sejak bulan oktober 2020 pengelolaan belanja pegawai pada KPKNL Palu sudah tersentralisasi oleh Kantor Pusat DJKN, sehingga pada tahun 2021 dan 2022 sudah tidak ada anggaran belanja pegawai.

*Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021*

URAIAN	31 DESEMBER 2022	31 DESEMBER 2021
Belanja Gaji Pokok PNS	0	0
Belanja Pembulatan Gaji PNS	0	0
Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	0	0
Belanja Tunj. Anak PNS	0	0
Belanja Tunj. Struktural PNS	0	0
Belanja Tunj.Fungsional PNS	0	0
Belanja Tunj. PPh PNS	0	0
Belanja Tunj. Beras PNS	0	0
Belanja Uang Makan PNS	0	0
Belanja Tunjangan Umum PNS	0	0
Belanja Uang Lembur	0	0
<b>Realisasi Belanja Bruto</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Pengembalian Belanja</i>	0	0
<b>Realisasi Belanja Netto</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Belanja Barang**

Rp1.485.302.31

1

**B.3 Belanja Barang**

Realisasi Belanja Barang periode 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp1.485.302.311 dan Rp1.310.270.510. Realisasi Belanja Barang periode 31 Desember 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp175.031.801 atau 13,4% dari Realisasi Belanja Barang 31 Desember 2021.

Perbandingan Belanja Barang 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

URAIAN	31 DESEMBER 2022	31 DESEMBER 2021	NAIK/(TURUN)	
			Rp	%
Belanja Keperluan Perkantoran	436.506.743	419.424.981	17.081.762	4,1%
Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	-	-	0	0,0%
Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	22.307.085	22.580.980	-273.895	-1,2%
Belanja Honor Operasional Satker	134.040.000	136.200.000	-2.160.000	-1,6%
Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi Covid-19	14.671.041	19.690.140	-5.019.099	-25,5%
Belanja Bahan	1.652.000	5.311.000	-3.659.000	-68,9%
Belanja Barang Operasional Lainnya	8.484.000		8.484.000	100,0%
Belanja Barang Non Operasional Lainnya	16.576.700	11.100.000	5.476.700	49,3%
Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	48.544.500	78.083.000	-29.538.500	-37,8%
Belanja Langganan Listrik	126.580.107	116.153.832	10.426.275	9,0%
Belanja Langganan Telepon	14.092.181	16.728.827	-2.636.646	-15,8%
Belanja Jasa-Penanganan Pandemi Covid-19	18.835.314	25.401.000	-6.565.686	-25,8%
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	226.044.000	186.302.300	39.741.700	21,3%
Belanja Pemeliharaan Peralatan & Mesin	111.080.829	121.028.028	-9.947.199	-8,2%
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	255.103.811	109.206.422	145.897.389	133,6%
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	50.784.000	43.060.000	7.724.000	17,9%
<b>Realisasi Belanja Bruto</b>	<b>1.485.302.311</b>	<b>1.310.270.510</b>	<b>175.031.801</b>	<b>13,4%</b>
<i>Pengembalian Belanja</i>		-	0	
<b>Realisasi Belanja Netto</b>	<b>1.485.302.311</b>	<b>1.310.270.510</b>	<b>175.031.801</b>	<b>13,4%</b>

Belanja Modal  
Rp0

**B.4 Belanja Modal**

Realisasi Belanja Modal periode 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp0 sedangkan pada 31 Desember 2021 realisasi Belanja Modal sebesar Rp61.798.999. Belanja Modal mengalami penurunan sebesar Rp61.798.999 atau -100%. Hal ini disebabkan pada tahun 2022 tidak terdapat belanja modal pada KPKNL Palu.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

URAIAN	31 DESEMBER 2022	31 DESEMBER 2021	NAIK (TURUN) %
Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	0	0	
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	-	61.798.999	-100,0%
Belanja Modal Gedung & Bangunan	-	-	
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>-</b>	<b>61.798.999</b>	<b>-100,0%</b>

## C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

*Kas di Bendahara  
Pengeluaran  
Rp0*

### C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp0.

Kas tersebut merupakan kas yang dikuasai, dikelola, dan berada di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari Uang Persediaan yang belum dipertanggung-jawabkan atau belum disetorkan ke Rekening Kas Negara per tanggal neraca.

*Kas di Bendahara  
Penerimaan  
Rp4.826.733*

### C.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp4.826.733 dan Rp514.167

Kas di Bendahara Penerimaan meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan pajak.

*Kas lainnya dan  
setara kas  
Rp484.208.767,6*

### C.3 Kas Lainnya dan Setara Kas

Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp484.208.767,6 dan Rp6.100.000.

Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan, baik saldo rekening di bank maupun uang tunai.

*Pendapatan Yang  
Masih Harus Diterima  
Rp0*

### C.4 Pendapatan Yang Masih Harus Diterima

Pendapatan Yang Masih Harus Diterima per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

Pendapatan Yang Masih Harus Diterima merupakan Pendapatan yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan, yang seharusnya sudah dibayarkan oleh wajib bayar namun belum diterima pembayarannya atau belum disetor ke Kas Negara.

Persediaan  
Rp21.159.686

### C.5 Persediaan

Nilai Persediaan per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing adalah sebesar Rp21.159.686 dan Rp22.940.930.

Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Rincian Persediaan per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

#### Rincian Persediaan

Persediaan	31 DESEMBER 2022	31 DESEMBER 2021
Barang Konsumsi	21.159.686	22.940.930
<b>Jumlah</b>	<b>21.159.686</b>	<b>22.940.930</b>

Tanah  
Rp32.864.083.988

### C.6 Tanah

Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Palu per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp32.864.083.988 dan Rp32.864.083.988. Saldo Tanah per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

#### Rincian Tanah

Klasifikasi	NUP	Luas	Lokasi	Nilai
Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1	3530 m2	Jl. Prof. Moh. Yamin No. 55 , Palu	19.011.571.000
Tanah Bangunan Rumah Negara	2	625 m2	Jl. D.I Panjaitan, Palu	2.059.217.000
Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	2	4337 m2	Jl. S. Parman, Palu	11.793.295.988
<b>Jumlah</b>				<b>32.864.083.988</b>

Peralatan dan Mesin  
Rp4.058.171.191

### C.7 Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah Rp4.058.171.191 dan Rp4.067.822.447. Terdapat mutasi berkurang pada peralatan dan mesin sejumlah Rp161.136.256 karena kondisi barang rusak berat sehingga dihenti digunakan. Peralatan dan mesin

tersebut sebagai berikut antara lain : rak kayu (1 unit) sebesar Rp1.250.000, Buffet (3 unit) sebesar Rp4.350.500, Meja Kerja Kayu (1 Unit) sebesar Rp5.000.000, Kursi Besi/Metal (1 Unit) sebesar Rp1.500.000, Sice (1 Unit) sebesar Rp17.952.000, A.C. Split (3 Unit) sebesar Rp21.098.000, Microphone Table Stand (2 Unit) sebesar Rp1.210.000, Peralatan Studio Audio Lainnya (1 Unit) sebesar Rp715.000, PC Unit (3 Unit) sebesar Rp46.714.583, Laptop (1 Unit) sebesar Rp12.566.673, Printer (1 Unit) sebesar Rp3.520.000, Router (1 Unit) sebesar Rp45.259.500.

Terdapat mutasi bertambah pada peralatan dan mesin sejumlah Rp114.942.000 pada barang sebagai berikut antara lain: Laptop (9 Unit) sebesar Rp121.875.000, Tablet PC (1 Unit) sebesar Rp10.795.000, Scanner Peralatan Personal Komputer (1 Unit) sebesar Rp13.915.000, dan Scanner Peralatan Mini Komputer (1 Unit) sebesar Rp4.900.000.

Gedung dan  
Bangunan  
Rp9.548.591.730

### C.8 Gedung dan Bangunan

Nilai gedung dan bangunan yang dimiliki Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Palu per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp9.548.591.730 dan Rp9.433.649.730. Terdapat mutasi tambah pada Bangunan Gedung Kantor sebesar Rp19.085.000 yang terjadi akibat koreksi pencatatan (penghapusan) atas Jaringan Distribusi Tegangan Diatas 20 KVA NUP 1. Selain itu terdapat mutasi tambah sebesar Rp95.857.000 karena reklasifikasi Jalan Khusus Kompleks NUP 1 menjadi Bangunan Parkir Lainnya. Saldo Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Gedung dan Bangunan	Saldo Per 1 Januari 2022	Mutasi		Saldo 31 Desember 2022
		Bertambah	Berkurang	
Bangunan Gedung Kantor	6.025.185.730	19.085.000		6.044.270.730
Bangunan Gudang	463.478.000			463.478.000
Bangunan Gedung Untuk Pos Jaga	6.865.000			6.865.000
Bangunan Parkir Terbuka Permanen	218.534.000			218.534.000
Bangunan Parkir Lainnya	-	95.857.000		95.857.000
Taman	134.364.000			134.364.000
Rumah Negara Golongan I	248.510.000			248.510.000
Rumah Negara Golongan II	1.137.675.000			1.137.675.000
Pagar	1.199.038.000			1.199.038.000
<b>Jumlah</b>	<b>9.433.649.730</b>	<b>114.942.000</b>	<b>-</b>	<b>9.548.591.730</b>

Jalan, Irigasi dan Jaringan  
Rp209.936.000

### C.9 Jalan, Irigasi dan Jaringan

Nilai Jalan, irigasi dan Jaringan yang dimiliki Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Palu per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp209.936.000 dan Rp324.878.000. Terdapat mutasi kurang sebesar Rp95.857.000 pada Jalan Khusus Kompleks yang terjadi akibat Reklasifikasi Pencatatan Jalan Khusus Kompleks NUP 1 menjadi Bangunan Parkir Lainnya. Selanjutnya terdapat juga mutasi kurang pada Jaringan Distribusi Tegangan Diatas 20 KVA NUP 1 karena adanya koreksi pencatatan (penghapusan) dan mengkapitalisasi nilai tersebut sebagai Gedung dan Bangunan dengan nilai buku sebesar Rp19.085.000.

#### Rincian Jalan, Irigasi dan Jaringan

Gedung dan Bangunan	Saldo Per 1 Januari 2022	Mutasi		Saldo 30 Desember 2022
		Bertambah	Berkurang	
Jalan dan Jembatan	305.793.000		95.857.000	209.936.000
Jaringan	19.085.000		19.085.000	-
<b>Jumlah</b>	<b>324.878.000</b>	<b>-</b>	<b>114.942.000</b>	<b>209.936.000</b>

Aset Tetap Lainnya  
Rp4.940.000

### C.10 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Aset tetap lainnya pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Palu yaitu berupa Buku Lainnya. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sama, yaitu sebesar Rp4.940.000. Tidak terdapat mutasi tambah ataupun kurang terhadap aset tetap lainnya pada tanggal pelaporan.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap  
(Rp4.228.421.372)

### C.11 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing (Rp4.228.421.372) dan (Rp3.728.294.891).

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Aset Tetap	31 DESEMBER 2022	31 DESEMBER 2021
Peralatan dan Mesin	3.218.515.615	2.650.459.606
Gedung dan Bangunan	894.440.957	937.927.042
Jalan, Irigasi dan Jaringan	115.464.800	139.908.243
<b>JUMLAH</b>	<b>4.228.421.372</b>	<b>3.728.294.891</b>

Aset Lainnya  
Rp0

### C.12 Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sama yaitu sebesar Rp0. Aset Lain-Lain adalah Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional lingkup Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Palu serta barang yang sedang dalam proses penghapusan dari BMN.

Akumulasi  
Penyusutan/Amortisasi  
i Aset Lainnya  
Rp0

### C.13 Akumulasi Penyusutan / Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sama yaitu sebesar Rp0. Akumulasi penyusutan aset lainnya merupakan kontra Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya.

Utang kepada Pihak  
Ketiga  
Rp486.765.586,6

### C.14 Utang kepada Pihak Ketiga

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp486.765.586,6 dan Rp8.536.120. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan).

Utang Yang Belum  
Ditagihkan  
Rp0

### C.15 Utang Yang Belum Ditagihkan

Nilai Utang Yang Belum Ditagihkan per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

Uang Muka dari KPPN  
Rp0

### **C.16 Uang Muka dari KPPN**

Penarikan dan pengembalian dana UP /TUP merupakan transaksi transitoris. Penarikan dana UP /TUP oleh Satker (SP2D) UP / TUP dicatat oleh Kuasa BUN sebagai pengurangan kas dan ekuitas (DDEL). Kuasa BUN juga menyajikan Kas di Bendahara Pengeluaran dan ekuitas. Sedangkan Satker mencatat sebagai penambahan Kas di Bendahara Pengeluaran dan kewajiban (Uang Muka dari KPPN). Dengan demikian nilai Uang Muka dari KPPN per tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sejumlah kas di bendahara pengeluaran pada periode yang sama yaitu Rp0 dan Rp0.

Ekuitas  
Rp42.480.731.137

### **C.17 Ekuitas**

Ekuitas per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp42.480.731.137 dan Rp42.988.098.251. Ekuitas adalah Kekayaan Bersih Entitas yang merupakan Selisih antara Aset dan Kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang Ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

**D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL**

Pendapatan Negara  
Bukan Pajak  
Rp5.415.693.218

**D.1 Pendapatan Negara Bukan Pajak**

Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp5.415.693.218 dan Rp4.778.320.702. Pendapatan tersebut terdiri dari:

*Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak Periode 31 Desember 2022 dan 2021*

NO	URAIAN	31 DESEMBER	31 DESEMBER	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	
		2022	2021	(Rp)	%
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
1	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan (425131)	0	0	-	0,0%
2	Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro) (425764)	6.996.171	3.296.580	3.699.591	112,2%
3	Pendapatan Bea Lelang oleh Balai Lelang atau Pejabat Lelang Kelas I (425782)	2.511.479.375	1.291.073.651	1.220.405.724	94,5%
4	Pendapatan Bea Lelang Pegadaian (425784)	2.870.155.240	3.356.862.992	(486.707.752)	-14,5%
5	Pendapatan Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara (425785)	26.421.326	126.139.920	(99.718.594)	-79,1%
6	Pendapatan Penyetoran Kelebihan Hasil Bersih Lelang yang Tidak Diambil oleh yang berhak (425995)	592.874	20.105	572.769	2848,9%
7	Pendapatan Anggaran Lain-lain (425999)	48.132	427.454	(379.322)	100,0%
8	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah (425811)			-	0,0%
9	Pendapatan Jasa Lainnya (425699)	100	500.000	(499.900)	0,0%
<b>Jumlah</b>		<b>5.415.693.218</b>	<b>4.778.320.702</b>	<b>637.372.516</b>	<b>13,3%</b>

Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro) muncul akibat rekening pada KPKNL Palu masih menggunakan metode *non Treasury National Pooling* (TNP) sehingga setiap bulannya bendahara penerimaan menerima Jasa Giro dan dipotong Pajak Penghasilan atas jasa giro tersebut. Bendahara penerimaan secara rutin menyetorkan Jasa Giro dan PPh tersebut kepada kas negara dan

KPKNL Palu sedang dalam tahap pengajuan untuk merubah menjadi *Treasury National Pooling (TNP)*

Beban Pegawai  
Rp0

## D.2 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Pada bulan Oktober 2020, Belanja Pegawai sudah diberlakukan sentralisasi yang menjadi tanggung jawab oleh Kantor Pusat DJKN, sehingga pada tahun anggaran 2021 sudah tidak ada anggaran untuk belanja Pegawai di KPKNL Palu. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Rincian Beban Pegawai 31 Desember 2022 dan 2021

URAIAN JENIS BEBAN	30 JUNI 2022	30 JUNI 2021	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	
			(Rp)	%
Beban Gaji Pokok PNS	-	-	-	0%
Pengembalian Belanja Gaji Pokok PNS	-	-	-	0%
Beban Pembulatan Gaji PNS	-	-	-	0%
Pengembalian Beban Pembulatan Gaji PNS	-	-	-	0%
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	-	-	-	0%
Pengembalian Belanja Beban Tunj. Suami/Istri PNS	-	-	-	0%
Beban Tunj. Anak PNS	-	-	-	0%
Beban Tunj. Struktural PNS	-	-	-	0%
Beban Tunj. Fungsional PNS	-	-	-	0%
Beban Tunj. PPh PNS	-	-	-	0%
Beban Tunj. Beras PNS	-	-	-	0%
Beban Uang Makan PNS	-	-	-	0%
Pengembalian Beban Uang Makan PNS	-	-	-	0%
Beban Tunjangan Umum PNS	-	-	-	0%
Pengembalian Beban Tunjangan Umum PNS	-	-	-	0%
Beban Uang Lembur	-	-	-	0%
<b>Jumlah</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>

Beban Persediaan  
Rp50.325.744

### D.3 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp50.325.744 dan Rp93.658.839. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Persediaan 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

URAIAN JENIS BEBAN	31 DESEMBER 2022	31 DESEMBER 2021	NAIK (TURUN) %	
			Rp	%
Beban Persediaan Konsumsi	50.325.744	93.658.839	-43.333.095	-46%
<b>Jumlah Beban Persediaan</b>	<b>50.325.744</b>	<b>93.658.839</b>	<b>-43.333.095</b>	<b>-46%</b>

Beban Barang dan  
Jasa  
Rp793.865.870

### D.4 Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa periode 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp793.865.870 dan Rp775.026.880. Beban Barang dan Jasa adalah konsumsi atas barang dan jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas.

Terdapat realisasi periode 31 Desember 2022 dalam rangka penanganan Pandemi COVID-19 sebesar Rp14.671.041 pada akun 521311 Belanja Barang Operasional – Penanganan Pandemi COVID-19 dan sebesar Rp18.835.314 pada akun 522192 Belanja Jasa-Penanganan Pandemi Covid-19.

## Rincian Beban Barang dan Jasa 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

URAIAN JENIS BEBAN	31 DESEMBER 2022	31 DESEMBER 2021	NAIK (TURUN) %	
			(Rp)	%
Beban Keperluan Perkantoran	436.506.743	419.424.981	17.081.762	4,1%
Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	-	-	-	0,0%
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	22.427.784	25.017.100	(2.589.316)	-10,4%
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	134.040.000	136.200.000	(2.160.000)	-1,6%
Beban Barang Operasional Lainnya	8.484.000	-	8.484.000	100,0%
Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	14.671.041	19.690.140	(5.019.099)	-25,5%
Beban Bahan	1.652.000	5.311.000	(3.659.000)	-68,9%
Beban Honor Output Kegiatan	-	-	-	0,0%
Beban Barang Persediaan Barang Konsumsi	-	-	-	0,0%
Beban Barang Non Operasional Lainnya	16.576.700	11.100.000	5.476.700	49,3%
Beban Langganan Telepon	14.092.181	16.728.827	(2.636.646)	-15,8%
Beban Langganan Listrik	126.580.107	116.153.832	10.426.275	9,0%
Belanja Modal BLU	-	-	-	0,0%
Beban Jasa Penanganan Pandemi COVID-19	18.835.314	25.401.000	(6.565.686)	-25,8%
<b>Jumlah</b>	<b>793.865.870</b>	<b>775.026.880</b>	<b>18.838.990</b>	<b>2,4%</b>

**Beban****Pemeliharaan**

Rp337.124.829

**D.5 Beban Pemeliharaan**

Beban Pemeliharaan per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp337.124.829 dan Rp307.330.328. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharaan untuk per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Pemeliharaan 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021*

URAIAN JENIS BEBAN	31 DESEMBER 2022	31 DESEMBER 2021	NAIK (TURUN) %	
			Rp	%
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	111.080.829	121.028.028	(9.947.199)	-8,2%
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	226.044.000	186.302.300	39.741.700	21,3%
<b>Jumlah</b>	<b>337.124.829</b>	<b>307.330.328</b>	<b>29.794.501,00</b>	<b>9,7%</b>

**Beban Perjalanan****Dinas**

Rp305.887.811

**D.6 Beban Perjalanan Dinas**

Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp305.887.811 dan Rp152.266.422. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Perjalanan Dinas 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021*

URAIAN JENIS BEBAN	31 DESEMBER 2022	31 DESEMBER 2021	NAIK (TURUN) %	
			Rp	%
Beban Perjalanan Biasa	255.103.811	109.206.422	145.897.389	133,6%
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	50.784.000	43.060.000	7.724.000	17,9%
<b>Jumlah</b>	<b>305.887.811</b>	<b>152.266.422</b>	<b>153.621.389</b>	<b>100,9%</b>

**Beban Penyusutan****dan Amortisasi**

Rp652.906.832

**D.7 Beban Penyusutan dan Amortisasi**

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp652.906.832 dan Rp683.656.994. Beban Penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

## Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

URAIAN BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	31 DESEMBER 2022	31 DESEMBER 2021	NAIK (TURUN) %	
			(Rp)	%
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	468.120.770	495.576.488	- 27.455.718	-5,5%
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	163.792.462	153.771.790	10.020.672	6,5%
Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	20.993.600	33.831.591	- 12.837.991	-37,9%
Beban Penyusutan Jaringan		477.125	- 477.125	-100,0%
Beban Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan	-	-	-	0,0%
<b>Jumlah Penyusutan</b>	<b>652.906.832</b>	<b>683.656.994</b>	- 30.750.162	-4,5%
<b>Amortisasi</b>	<b>652.906.832</b>	<b>683.656.994</b>	- <b>30.750.162</b>	<b>-4,5%</b>

Surplus/Defisit dari  
Kegiatan Non  
Operasional  
Rp3.761.000

## D.8 Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

## Rincian Kegiatan Non Operasional 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

URAIAN	31 DESEMBER 2022	31 DESEMBER 2021	NAIK (TURUN) %	
			(Rp)	%
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	-	-	-	0,0%
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	-	-	-	0,0%
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	-	-	-	0,0%
Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar	3.761.000	17.146.436	- 13.385.436	0,0%
<b>Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional</b>	<b>3.761.000</b>	<b>17.146.436</b>	- <b>13.385.436</b>	<b>-78,1%</b>

## E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

*Ekuitas Awal*  
*Rp42.988.098.251*

### E.1 Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2022 dan 1 Januari 2021 adalah masing-masing sebesar Rp42.988.098.251 dan Rp48.718.036.951.

*Surplus/(Defisit) LO*  
*Rp3.279.343.132*

### E.2 Surplus (Defisit) LO

Jumlah Surplus/Defisit-LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp3.279.343.132 dan Rp2.783.527.675, Surplus/Defisit LO merupakan selisih lebih atau kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, sampai dengan pos luar biasa.

*Dampak Kumulatif*  
*Perubahan*  
*Kebijakan*  
*Akuntansi /*  
*Kesalahan*  
*Mendasar*  
*Rp -*

### E.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar

Tidak terdapat transaksi Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021.

*Koreksi yang*  
*Menambah/*  
*Mengurangi Ekuitas*  
*Rp16.267.845*

### E.4 Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas

Koreksi yang menambah/mengurangi ekuitas pada 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp16.267.845 dan 31 Desember 2021 sebesar Rp0.

#### *Rincian Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas*

Uraian	Nilai
Reklasifikasi Masuk Bangunan Parkir Lainnya	45.568.324
Koreksi Susulan Bangunan Gedung Kantor Permanen	19.085.000
Koreksi Manual Bangunan Gedung Kantor Permanen	(34.548.854)
Koreksi Atas Perbaikan saldo akun Beban Pelepasan Aset	(13.598.062)
Koreksi atas Beban Penyusutan Jaringan	(238.563)
<b>Total</b>	<b>16.267.845</b>

*Penyesuaian Nilai*  
*Aset*  
*Rp -*

### Penyesuaian Nilai Aset

Nilai penyesuaian nilai aset untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Penyesuaian nilai aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir.

Selisih Revaluasi  
Aset Tetap Rp0

### Selisih Revaluasi Aset Tetap

Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya karena revaluasi nilai.

Koreksi Nilai Aset  
Tetap Non  
Revaluasi  
Rp16.267.845

### Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi

Koreksi aset tetap non revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp16.267.845 dan Rp0.

#### Rincian Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi

Uraian	Nilai
Reklasifikasi Masuk Bangunan Parkir Lainnya	45.568.324
Koreksi Susulan Bangunan Gedung Kantor Permanen	19.085.000
Koreksi Manual Bangunan Gedung Kantor Permanen	(34.548.854)
Koreksi Atas Perbaikan saldo akun Beban Pelepasan Aset	(13.598.062)
Koreksi atas Beban Penyusutan Jaringan	(238.563)
<b>Total</b>	<b>16.267.845</b>

Transaksi Antar  
Entitas  
(Rp3.802.978.091)

### E.5 Transaksi Antar Entitas

Transaksi antar entitas pada tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar (Rp3.802.978.091) dan (Rp8.513.466.375).

Rincian transaksi antar entitas terdiri dari:

#### Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas

Transaksi Antar Entitas	Nilai	
	30 SEPTEMBER 2022	30 SEPTEMBER 2021
Diterima dari Entitas Lain	(5.415.141.652)	(4.812.559.872)
Ditagihkan ke Entitas Lain	1.485.302.311	1.372.069.509
Transfer Masuk	126.861.250	-
Transfer Keluar	-	(5.072.976.012)
Pengesahan Hibah Langsung	-	-
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>(3.802.978.091)</b>	<b>(8.513.466.375)</b>

Ekuitas Akhir  
Rp42.480.731.137

### E.6 Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp42.480.731.137 dan Rp42.988.098.251.



**LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 - AUDITED  
(DALAM RUPIAH)**



**KEMENTERIAN/LEMBAGA** : KEMENTERIAN KEUANGAN 015  
**ESELON I** : DITJEN KEKAYAAN NEGARA 09  
**SATUAN KERJA** : KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PALU 538002

Tgl Data : 08/05/23 6:00 AM

Tgl Cetak : 08/05/23 1:09 PM

Halaman : 2

lap\_lra\_face\_satker\_komparatif

NO	URAIAN	2022				2021			
		ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	3	4	5	6	3	4	5	6
	Dana Alokasi Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dana Alokasi Khusus Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
	Data Otonomi Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dana Desa	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>JUMLAH BELANJA (B I + B II)</b>	<b>1,652,889,000</b>	<b>1,485,302,311</b>	<b>167,586,689</b>	<b>90</b>	<b>1,414,463,000</b>	<b>1,372,069,509</b>	<b>42,393,491</b>	<b>97</b>
<b>C</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>				0				0

Keterangan :

BELUM FINAL

\*) MASIH BELUM DILAKUKAN TUTUP PERIODE

PALU, 8 Mei 2023

Penanggung Jawab UAKPA  
KUASA PENGGUNA ANGGARAN

KRISDIANTO  
198105242001121001

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN  
MENURUT KELOMPOK PENDAPATAN / AKUN  
TINGKAT SATUAN KERJA  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022  
(dalam rupiah)**

**KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA** : 015  
**ESELON I** : 09  
**WILAYAH/PROVINSI** : 1800  
**SATUAN KERJA** : 538002

**KEMENTERIAN KEUANGAN**  
**DITJEN KEKAYAAN NEGARA**  
**SULAWESI TENGAH**  
**KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PALU**

Kode Lap : LRA.P.E1.1  
Tanggal : 08/05/23 2:36 PM  
Halaman : 1  
Prg ID : lap\_lra\_pen\_akun\_satker

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
42	PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK					
4251	Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan					
425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	3,761,000	0	3,761,000	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4251	0	3,761,000	0	3,761,000	
4256	Pendapatan Jasa Lainnya					
425699	Pendapatan Jasa Lainnya	0	100	0	100	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4256	0	100	0	100	
4257	Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan, dan Pengelolaan					
425764	Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	0	6,996,171	0	6,996,171	0
425782	Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas I	2,029,000,000	2,511,993,542	0	2,511,993,542	123.8
425784	Pendapatan Bea Lelang Pegadaian	1,638,000,000	2,870,155,240	0	2,870,155,240	175.22
425785	Pendapatan Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara	237,000	21,594,593	0	21,594,593	9111.64
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4257	3,667,237,000	5,410,739,546	0	5,410,739,546	147.54
4259	Pendapatan Lain-Lain					
425995	Pendapatan Penyetoran Kelebihan Hasil Bersih Lelang yang Tidak Diambil	0	592,874	0	592,874	0
425999	Pendapatan Anggaran Lain-lain	0	48,132	0	48,132	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4259	0	641,006	0	641,006	
	JUMLAH KELOMPOK PENDAPATAN 42	3,667,237,000	5,415,141,652	0	5,415,141,652	147.66
	JUMLAH PENDAPATAN	3,667,237,000	5,415,141,652	0	5,415,141,652	147.66

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA  
TINGKAT SATUAN KERJA  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022**



**KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA** : 015  
**ESELON I** : 09  
**WILAYAH/PROVINSI** : 016  
**SATUAN KERJA** : 538002  
**JENIS SATUAN KERJA** : KD

**KEMENTERIAN KEUANGAN**  
**DITJEN KEKAYAAN NEGARA**  
**SULAWESI TENGAH**  
**KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PALU**

Kode Lap : LRA.B.S.2  
Tanggal : 08/05/23 2:36 PM  
Halaman : 1  
Prg ID : lap\_lra\_bel\_akun\_satker  
Tgl Data : 8/5/23 1:39 PM

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
52	BELANJA BARANG							
5211	Belanja Barang Operasional							
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	447,920,000	458,786,000	436,506,743	0	436,506,743	95.14	22,279,257
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	27,600,000	24,000,000	22,307,085	0	22,307,085	92.95	1,692,915
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	134,040,000	134,040,000	134,040,000	0	134,040,000	100	0
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	0	8,500,000	8,484,000	0	8,484,000	99.81	16,000
521131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	19,170,000	15,210,000	14,671,041	0	14,671,041	96.46	538,959
	<b>JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211</b>	<b>628,730,000</b>	<b>640,536,000</b>	<b>616,008,869</b>	<b>0</b>	<b>616,008,869</b>	<b>96.17</b>	<b>24,527,131</b>
5212	Belanja Barang Non Operasional							
521211	Belanja Bahan	10,045,000	4,323,000	1,652,000	0	1,652,000	38.21	2,671,000
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	10,736,000	17,184,000	16,576,700	0	16,576,700	96.47	607,300
	<b>JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212</b>	<b>20,781,000</b>	<b>21,507,000</b>	<b>18,228,700</b>	<b>0</b>	<b>18,228,700</b>	<b>84.76</b>	<b>3,278,300</b>
5218	Belanja Barang Persediaan							
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	73,766,000	65,844,000	48,544,500	0	48,544,500	73.73	17,299,500
	<b>JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218</b>	<b>73,766,000</b>	<b>65,844,000</b>	<b>48,544,500</b>	<b>0</b>	<b>48,544,500</b>	<b>73.73</b>	<b>17,299,500</b>
5221	Belanja Jasa							
522111	Belanja Langganan Listrik	132,000,000	127,800,000	126,580,107	0	126,580,107	99.05	1,219,893
522112	Belanja Langganan Telepon	19,200,000	19,200,000	14,092,181	0	14,092,181	73.4	5,107,819
522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	29,097,000	21,672,000	18,835,314	0	18,835,314	86.91	2,836,686
	<b>JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221</b>	<b>180,297,000</b>	<b>168,672,000</b>	<b>159,507,602</b>	<b>0</b>	<b>159,507,602</b>	<b>94.57</b>	<b>9,164,398</b>
5231	Belanja Pemeliharaan							
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	203,811,000	230,665,000	226,044,000	0	226,044,000	98	4,621,000
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	152,350,000	133,237,000	111,080,829	0	111,080,829	83.37	22,156,171
	<b>JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5231</b>	<b>356,161,000</b>	<b>363,902,000</b>	<b>337,124,829</b>	<b>0</b>	<b>337,124,829</b>	<b>92.64</b>	<b>26,777,171</b>
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri							
524111	Belanja Perjalanan Biasa	279,196,000	323,908,000	255,103,811	0	255,103,811	78.76	68,804,189
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	65,040,000	68,520,000	50,784,000	0	50,784,000	74.12	17,736,000
	<b>JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241</b>	<b>344,236,000</b>	<b>392,428,000</b>	<b>305,887,811</b>	<b>0</b>	<b>305,887,811</b>	<b>77.95</b>	<b>86,540,189</b>
	<b>JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52</b>	<b>1,603,971,000</b>	<b>1,652,889,000</b>	<b>1,485,302,311</b>	<b>0</b>	<b>1,485,302,311</b>	<b>89.86</b>	<b>167,586,689</b>
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>1,603,971,000</b>	<b>1,652,889,000</b>	<b>1,485,302,311</b>	<b>0</b>	<b>1,485,302,311</b>	<b>89.86</b>	<b>167,586,689</b>

**NERACA**  
**TINGKAT SATUAN KERJA**  
**PER 31 DESEMBER 2022 - AUDITED**  
(DALAM RUPIAH)



**KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : ( 015 ) KEMENTERIAN KEUANGAN**  
**UNIT ORGANISASI : ( 09 ) DITJEN KEKAYAAN NEGARA**  
**WILAYAH/PROVINSI : ( 1800 ) SULAWESI TENGAH**  
**SATUAN KERJA : ( 538002 ) KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PALU**

Tgl Data : 08/05/23 6:00 AM

Tgl Cetak : 08/05/23 1:10 PM

Halaman : 1

lap\_neraca\_satker\_komparatif

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2022	2021	Jumlah	%
1	2	3	4	5
<b>ASET</b>				
<b>ASET LANCAR</b>				
Kas di Bendahara Penerimaan	4,826,733	514,167	4,312,566	838.75
Kas Lainnya dan Setara Kas	484,208,767.6	6,100,000	478,108,768	7,837.85
Persediaan	21,159,686	22,940,930	(1,781,244)	(7.76)
<b>JUMLAH ASET LANCAR</b>	<b>510,195,186.6</b>	<b>29,555,097</b>	<b>480,640,090</b>	<b>1,626.25</b>
<b>ASET TETAP</b>				
Tanah	32,864,083,988	32,864,083,988	0	0.00
Peralatan dan Mesin	4,058,171,191	4,067,822,447	(9,651,256)	(0.24)
Gedung dan Bangunan	9,548,591,730	9,433,649,730	114,942,000	1.22
Jalan, Irigasi dan Jaringan	209,936,000	324,878,000	(114,942,000)	(35.38)
Aset Tetap Lainnya	4,940,000	4,940,000	0	0.00
AKUMULASI PENYUSUTAN	(4,228,421,372)	(3,728,294,891)	(500,126,481)	13.41
<b>JUMLAH ASET TETAP</b>	<b>42,457,301,537</b>	<b>42,967,079,274</b>	<b>(509,777,737)</b>	<b>(1.19)</b>
<b>JUMLAH ASET</b>	<b>42,967,496,723.6</b>	<b>42,996,634,371</b>	<b>(29,137,647)</b>	<b>(0.07)</b>
<b>KEWAJIBAN</b>				
<b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>				
Utang kepada Pihak Ketiga	486,765,586.6	8,536,120	478,229,467	5,602.42
<b>JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>	<b>486,765,586.6</b>	<b>8,536,120</b>	<b>478,229,467</b>	<b>5,602.42</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>	<b>486,765,586.6</b>	<b>8,536,120</b>	<b>478,229,467</b>	<b>5,602.42</b>
<b>EKUITAS</b>				
<b>EKUITAS</b>				
Ekuitas	42,480,731,137	42,988,098,251	(507,367,114)	(1.18)
<b>JUMLAH EKUITAS</b>	<b>42,480,731,137</b>	<b>42,988,098,251</b>	<b>(507,367,114)</b>	<b>(1.18)</b>
<b>JUMLAH EKUITAS</b>	<b>42,480,731,137</b>	<b>42,988,098,251</b>	<b>(507,367,114)</b>	<b>(1.18)</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>	<b>42,967,496,724</b>	<b>42,996,634,371</b>	<b>(29,137,647)</b>	<b>(0.07)</b>

Keterangan :

BELUM FINAL

\*) MASIH BELUM DILAKUKAN TUTUP PERIODE

PALU, 8 Mei 2023  
Penanggung Jawab UAKPA  
**KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

KRISDIANTO  
198105242001121001

## NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA  
PER 31 DESEMBER 2022 - AUDITED  
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : ( 015 ) KEMENTERIAN KEUANGAN

UNIT ORGANISASI : ( 09 ) DITJEN KEKAYAAN NEGARA

WILAYAH/PROVINSI : ( 1800 ) SULAWESI TENGAH

SATUAN KERJA : ( 538002 ) KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN  
LELANG PALU

Tgl Data : 08/05/23 12:00 PM

Tgl Cetak : 08/05/23 3:01 PM

Halaman : 1

lap\_neraca\_percobaan\_akrual\_satker

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBIT	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	111711	Kas di Bendahara Penerimaan	4,826,733	0
0.0	111825	Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan	484,208,767.6	0
0.0	117111	Barang Konsumsi	21,159,686	0
0.0	131111	Tanah	32,864,083,988	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	4,058,171,191	0
0.0	133111	Gedung dan Bangunan	9,548,591,730	0
0.0	134111	Jalan dan Jembatan	209,936,000	0
0.0	135121	Aset Tetap Lainnya	4,940,000	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	3,218,515,615
0.0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	894,440,957
0.0	137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	0	115,464,800
0.0	212112	Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	0	2,556,819
0.0	212192	Dana Pihak Ketiga	0	484,208,767.6
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	1,485,302,311
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	5,415,141,652	0
0.0	313221	Transfer Masuk	0	126,861,250
0.0	391111	Ekuitas	0	42,988,098,251
0.0	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	0	16,267,845
3.0	425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	3,761,000
3.0	425699	Pendapatan Jasa Lainnya	0	100
3.0	425764	Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	0	6,996,171
3.0	425782	Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas I	0	2,511,479,375
3.0	425784	Pendapatan Bea Lelang Pegadaian	0	2,870,155,240
3.0	425785	Pendapatan Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara	0	26,421,326
3.0	425995	Pendapatan Penyetoran Kelebihan Hasil Bersih Lelang yang Tidak Diambil oleh yang Berhak	0	592,874
3.0	425999	Pendapatan Anggaran Lain-lain	0	48,132
3.0	521111	Beban Keperluan Perkantoran	436,506,743	0
3.0	521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	22,427,784	0
3.0	521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	134,040,000	0
3.0	521119	Beban Barang Operasional Lainnya	8,484,000	0
3.0	521131	Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	14,671,041	0
3.0	521211	Beban Bahan	1,652,000	0
3.0	521219	Beban Barang Non Operasional Lainnya	16,576,700	0
3.0	522111	Beban Langganan Listrik	126,580,107	0
3.0	522112	Beban Langganan Telepon	14,092,181	0
3.0	522192	Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	18,835,314	0
3.0	523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	226,044,000	0
3.0	523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	111,080,829	0

## NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA  
PER 31 DESEMBER 2022 - AUDITED  
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : ( 015 ) KEMENTERIAN KEUANGAN  
UNIT ORGANISASI : ( 09 ) DITJEN KEKAYAAN NEGARA  
WILAYAH/PROVINSI : ( 1800 ) SULAWESI TENGAH  
SATUAN KERJA : ( 538002 ) KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN  
LELANG PALU

Tgl Data : 08/05/23 12:00 PM

Tgl Cetak : 08/05/23 3:01 PM

Halaman : 2

lap\_neraca\_percobaan\_akrual\_satker

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	524111	Beban Perjalanan Biasa	254,683,811	0
3.0	524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	51,204,000	0
3.0	591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	468,120,770	0
3.0	591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	163,792,462	0
3.0	591311	Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	20,993,600	0
3.0	593111	Beban Persediaan konsumsi	50,325,744	0
JUMLAH			54,751,170,833.6	54,751,170,833.6

Keterangan :

BELUM FINAL

\*) MASIH BELUM DILAKUKAN TUTUP PERIODE

PALU, 8 Mei 2023

Penanggung Jawab UAKPA  
KUASA PENGGUNA ANGGARANKRISDIANTO  
198105242001121001

**LAPORAN OPERASIONAL**  
**TINGKAT SATUAN KERJA**  
**PER 31 DESEMBER 2022 - AUDITED**  
**(DALAM RUPIAH)**



**KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : ( 015 ) KEMENTERIAN KEUANGAN**  
**UNIT ORGANISASI : ( 09 ) DITJEN KEKAYAAN NEGARA**  
**WILAYAH/PROVINSI : ( 1800 ) SULAWESI TENGAH**  
**SATUAN KERJA : ( 538002 ) KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PALU**

Tgl Data : 08/05/23 6:00 AM

Tgl Cetak : 08/05/23 1:07 PM

Halaman : 1

lap\_lo\_satker

URAIAN	2022	2021	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0	0	0	
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0	0	0	
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Cukai	0	0	0	
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0	
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	
Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba	0	0	0	
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	5,415,693,218	4,778,320,702	637,372,516	13.339
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	5,415,693,218	4,778,320,702	637,372,516	13.339
PENDAPATAN HIBAH	0	0	0	
Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan	5,415,693,218	4,778,320,702	637,372,516	13.339
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	
Beban Pegawai	0	0	0	
Beban Persediaan	50,325,744	93,658,839	(43,333,095)	(46.267)
Beban Barang dan Jasa	793,865,870	775,026,880	18,838,990	2.431
Beban Pemeliharaan	337,124,829	307,330,328	29,794,501	9.695
Beban Perjalanan Dinas	305,887,811	152,266,422	153,621,389	100.89
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	0	0	0	
Beban Bunga	0	0	0	

**LAPORAN OPERASIONAL**  
**TINGKAT SATUAN KERJA**  
 PER 31 DESEMBER 2022 - AUDITED  
 (DALAM RUPIAH)



**KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : ( 015 ) KEMENTERIAN KEUANGAN**  
**UNIT ORGANISASI : ( 09 ) DITJEN KEKAYAAN NEGARA**  
**WILAYAH/PROVINSI : ( 1800 ) SULAWESI TENGAH**  
**SATUAN KERJA : ( 538002 ) KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PALU**

Tgl Data : 08/05/23 6:00 AM

Tgl Cetak : 08/05/23 1:07 PM

Halaman : 2

lap\_lo\_satker

URAIAN	2022	2021	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Beban Subsidi	0	0	0	
Beban Hibah	0	0	0	
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	
Beban Penyusutan dan Amortisasi	652,906,832	683,656,994	(30,750,162)	(4.498)
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	0	0	0	
Beban Transfer	0	0	0	
Beban Lain-Lain	0	0	0	
<b>JUMLAH BEBAN</b>	<b>2,140,111,086</b>	<b>2,011,939,463</b>	<b>128,171,623</b>	<b>6.371</b>
<b>SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL</b>	<b>3,275,582,132</b>	<b>2,766,381,239</b>	<b>509,200,893</b>	<b>18.407</b>
<b>KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar	3,761,000	17,146,436	(13,385,436)	(78.065)
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	3,761,000	33,507,500	(29,746,500)	(88.776)
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	0	16,361,064	(16,361,064)	(100)
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
<b>JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>	<b>3,761,000</b>	<b>17,146,436</b>	<b>(13,385,436)</b>	<b>(78.065)</b>
<b>SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA</b>	<b>3,279,343,132</b>	<b>2,783,527,675</b>	<b>495,815,457</b>	<b>17.812</b>
POS LUAR BIASA	0	0	0	
Beban Luar Biasa	0	0	0	
POS LUAR BIASA	0	0	0	
<b>SURPLUS/DEFISIT - LO</b>	<b>3,279,343,132</b>	<b>2,783,527,675</b>	<b>495,815,457</b>	<b>17.812</b>

---

Keterangan :

BELUM FINAL

\*) MASIH BELUM DILAKUKAN TUTUP PERIODE

PALU, 8 Mei 2023

Penanggung Jawab UAKPA  
KUASA PENGGUNA ANGGARAN

KRISDIANTO

198105242001121001

**LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**  
**TINGKAT SATUAN KERJA**  
 PER 31 DESEMBER 2022 - AUDITED  
 (DALAM RUPIAH)



**KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : ( 015 ) KEMENTERIAN KEUANGAN**  
**UNIT ORGANISASI : ( 09 ) DITJEN KEKAYAAN NEGARA**  
**WILAYAH/PROVINSI : ( 1800 ) SULAWESI TENGAH**  
**SATUAN KERJA : ( 538002 ) KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PALU**

Tgl Data : 08/05/23 6:00 AM

Tgl Cetak : 08/05/23 1:09 PM

Halaman : 1

lap\_lpe\_satker

URAIAN	2022	2021	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	42,988,098,251	48,718,036,951	(5,729,938,700)	-
SURPLUS/DEFISIT-LO	3,279,343,132	2,783,527,675	495,815,457	-
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	16,267,845	0	16,267,845	-
PENYESUAIAN NILAI ASET	0	0	0	-
SELISIH REVALUASI ASET	0	0	0	-
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	16,267,845	0	16,267,845	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	(3,802,978,091)	(8,513,466,375)	4,710,488,284	-
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	(507,367,114)	(5,729,938,700)	5,222,571,586	-
EKUITAS AKHIR	42,480,731,137	42,988,098,251	(507,367,114)	-

Keterangan :

BELUM FINAL

\*) MASIH BELUM DILAKUKAN TUTUP PERIODE

PALU, 8 Mei 2023

Penanggung Jawab UAKPA

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

KRISDIANTO

198105242001121001